

Mekanisme Pengelolaan Kepentingan Publik Ala Negara: Model Klasik (Etatisme)

Fatih Gama Abisono, SIP, MA
Teori Governance

PENANGANAN MASALAH OLEH NEGARA

a la negara

negara

a la pasar

PENANGANAN MASALAH OLEH NEGARA

negara

a la negara

a la pasar

PENANGANAN MASALAH OLEH NEGARA

negara

a la negara

a la pasar

TATA PEMERINTAHAN SERBA NEGARA

negara

rakyat

a la negara

**a la
negara**

a la pasar

a la pasar

Bagaimana Policy Making a La Negara?

- ▶ Dalam model state-centric bahkan otoritarian, proses kebijakan adalah proses yang berlangsung dalam birokrasi pemerintah.
- ▶ Proses kebijakan, juga proses *governance* = proses untuk memastikan bahwa apa yang dirancang oleh negara betul-betul terlaksana. Hal ini dilakukan karena penguasa otoriter mengasumsinya dirinyalah yang paling tahu tentang substansi persoalan, dirinya telah memahami konteks dengan baik.

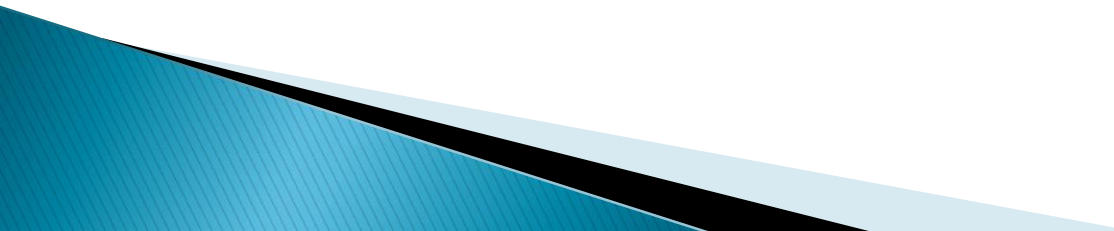
Karakter Kekuasaan Orba

- ▶ Benedict Anderson (1983) → Orba adalah kekuasaan Negara & pengikutnya vis-à-vis masy & bangsa
- ▶ Dwight King (1982) → Bureaucratic Authoritarian: upaya pemerintah orba dlm menciptakan “controlled participation” melalui penciptaan lembaga2 korporatisme negara
- ▶ Donald Emmerson (1983) → Bureaucratic Pluralism: pol orba tdk sepenuhnya otoriter krn msh terdpt kompetisi yg cukup sengit diantara para kel pejabat negara dlm mengaplikasikan visinya dlm pembangunan

Karakter Kekuasaan Orba

- ▶ William Liddle (1987) → pol Ina tdk sepenuhnya didominasi pejabat tinggi di pusat krn beberapa aktor pol lain di daerah memiliki keterlibatan, meskipun terbatas & bersifat tdk langsung
- ▶ Andrew MacIntyre (1990) → kel pengusaha di akhir th 1980-an mampu mengorganisir diri utk mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui partisipasi kel & bkn melalui cara2 klientelisme
- ▶ Philip Eldridge (1995) → betapa lembaga2 sosial non-negara menempati posisi yg lemah dlm pol serta tdk mengalami perkembangan posisi yg berarti dr waktu ke waktu
- ▶ Anders Uhlin (1999) → sdh ada kel2 oposisi, tapi blm ada koordinasi & jaringan yg rapi diantara mrk

Sentralisme Orde Baru

- ▶ Kekuasaan Negara/Pemerintah yg sangat dominan
 - ▶ Masyarakat yg sangat termarginal
 - ▶ Proses pembentukan negara orde baru → instrumen kekerasan, hukuman, dll
 - ▶ Proses pembentukan bangsa → top down, uniformalitas, tanpa dialog, dll
- 

Sentralisme & Urusan Publik

- ▶ Prinsip pengelolaan kekuasaan secara TERPUSAT yang dipegang oleh satu badan otoritatif yang memiliki segala kewenangan dan pengambilan keputusan.
- ▶ Konteks Kelahiran: Kebutuhan membangun tertib politik terutama bagi negara paska kolonial (dunia 3) dalam menopang modernisasi & pembangunan ekonomi.
- ▶ Basis dari sentralisasi:
 1. Politik → Nation and State Building
 2. Ideologis → Penguasaan aset produksi scr Kolektif
 3. Modernisasi → Tertib politik yang diabdikan pada pembangunan politik

Menimbang Sentralisme

- ▶ Kelebihan Sentralisasi:
 - ▶ Instrumen yang efektif bagi pembentukan kesatuan politik.
 - ▶ Adanya kesatuan sistem hukum) yang ditopang dengan pola yang seragam
 - ▶ Mampu mengkonsolidasikan sumber daya secara efektif & efisien, dalam konteks pembangunan ekonomi dan modernisasi.
 - ▶ Merupakan sarana efektif dalam pengambilan keputusan, karena hanya diputuskan oleh pemerintah pusat.

- ▶ Kelemahan Sentralisasi:
 - ▶ Rentan memunculkan pemerintahan tiran atau sekurang-kurangnya otoritarian.
 - ▶ Memunculkan ketimpangan baik secara spasial (daerah) atau golongan, meski pertumbuhan tinggi. → Trickle Down Effect.
 - ▶ Meminggirkan daerah dan tidak sensitif terhadap lokalitas (nilai, sentimen, dan aspirasi daerah).

Policy Making ala Negara: Teknokrasi

- ▶ GBHN : Garis-garis Besar Haluan Negara
 - ▶ Repelita/Pelita
 - ▶ SPPN → UU 25/2004
- 

Pendekatan Kebijakan



Pendekatan Politik:

Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (*public choice theory of planning*), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.



Proses Teknokratik:

Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.



Partisipatif:

Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh *stakeholders*, antara lain melalui Musrenbang.



Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

Prasyarat Dapat Diimplikasikan Suatu Kebijakan

- ▶ **Faktual dan Realistis** → Sesuai dengan kondisi aktual di masyarakat, dan realistis secara ekonomi maupun politis untuk dijalankan
 - ▶ **Logis dan Rasional** → Perencanaan yang dibuat dapat diterima akal sehat secara argumentatif
 - ▶ **Komprehensif atau menyeluruh** → Mempertimbangkan seluruh faktor/variabel yang mempengaruhi
 - ▶ **Fleksibel** → Dapat berubah sesuai perkembangan kondisi dan kebutuhan yang ada
 - ▶ **Komitmen** → Adanya perasaan memiliki dan komitmen untuk menjalankan rencana dari seluruh *stakeholders*
- Bisa didapat melalui perencanaan yang **Teknokratik**
- Bisa didapat melalui perencanaan yang **Partisipatif**

Rasionalitas dalam Kebijakan Publik

- ▶ Menurut Goulet^[1], ada tiga rasionalitas yang saling ber-inter-relasi dalam penentuan keputusan-keputusan publik, yaitu :
 - *Technological Rationality* bersandar pada epistemologi ilmu modern yang mengedepankan logika efisiensi.
 - *Politicant rationality* merupakan logika kepentingan yang selalu mengedepankan pemeliharaan institusi dan kebijakan. Lebih jauh dari itu, pada realitasnya seringkali motif-motif pemeliharaan institusi dan kebijakan itu menjadi alasan yang menyelubungi motif-motif mempertahankan kekuasaan dan mencari keuntungan.
 - *Ethical rationality* lebih menekankan pada pencitaan, pemeliharaan atau mempertahankan norma-norma.
- ▶ Political dan ethical rationality lebih mengacu pada apa yang dianggap “baik” oleh masyarakat, sementara technological rationality biasanya mengacu pada apa yang dianggap “benar” oleh perencana (negara).
- ▶ Dilema timbul saat sesuatu yang dianggap “benar” itu belum tentu dianggap “baik” oleh masyarakat.

[1] Goulet, D (1986), “Three Rationalities in Development Decision-Making”. World Development vol 14, no 2, page 310-317.

Terminologi Kebijakan Pembangunan Teknokratis

- ▶ Teknokrasi secara etimologis berasal dari kata-kata *techné* (teknik) dan *kratein* (memerintah). Teknokrasi ialah pemerintahan yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip teknologi, seperti efisiensi, kuantifikasi, produktivitas, perencanaan, dan penggunaan kiat, serta SOTA (*state of the art*).
- ▶ Pembangunan yang teknokratik menempatkan pemerintah sebagai pihak yang secara mutlak berwenang untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan untuk kepentingan publik, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis dari pemerintah sendiri.
- ▶ Model ini biasanya berafiliasi dengan pola pembangunan *top-down*, dimana pemerintah berwenang mengatur masyarakat dan tingkat pemerintahan dibawahnya dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah itu sendiri.
- ▶ Dalam pembangunan teknokratis, yang diutamakan adalah pertimbangan teknis dan keilmuan dari pemerintah dalam membangun fondasi argumentatif strategi pembangunan.

Tertib Politik *A la* Negara

A la Negara

- Publik
- Otoritas & hierarkhi
- *Rules & role*
- Prosedur & mekanisme
- Kepatuhan

Cara Aktor Berfikir:

- Dari umum ke khusus:
Negara mengatasnamakan rakyat
- Penataan publik atas nama individu: Negara adalah instrumen kekuasaan
- Mengacu pada ketentuan resmi:
Kontroversi diselesaikan dengan mengandalkan otoritas

TERIMA KASIH